

Bab I

Pendahuluan

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Malinau. Awal pembentukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dengan nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pada tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17 tahun 2008 dan ada penambahan nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan terakhir adalah dengan adanya Perda No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Malinau yang diperkuat dengan Perbup No. 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perindagkop dan UMKM berubah nomenklturnya menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah tanggal 28 Desember 2016

Adapun Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sesuai dengan skala prioritas, target pencapaian dan kebutuhan masyarakat sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah.

2. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang secara maksimal sesuai dengan target capaian yang ditetapkan.
3. Mengadakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian baik ditingkat internal maupun eksternal dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UMKM.
4. Melaksanakan tata kelola usaha dinas secara profesional guna mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan .

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda pembangunan di Kab. Malinau. Aspek strategisnya yakni pada sektor perekonomian daerah.

Sesuai dengan Misi Pembangunan Kab. Malinau sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 pada poin yang keempat yakni : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, Pasar, Bank, dan pusat perdagangan, maka peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
2. Mengembangkan sistem perdagangan yang efektif, efisien dan berdaya saing.
3. Memberdayakan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
4. Memberikan pelayanan kepada publik secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan wewenang yang diberikan didukung sumber daya manusia aparatur yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

D. Struktur Organisasi

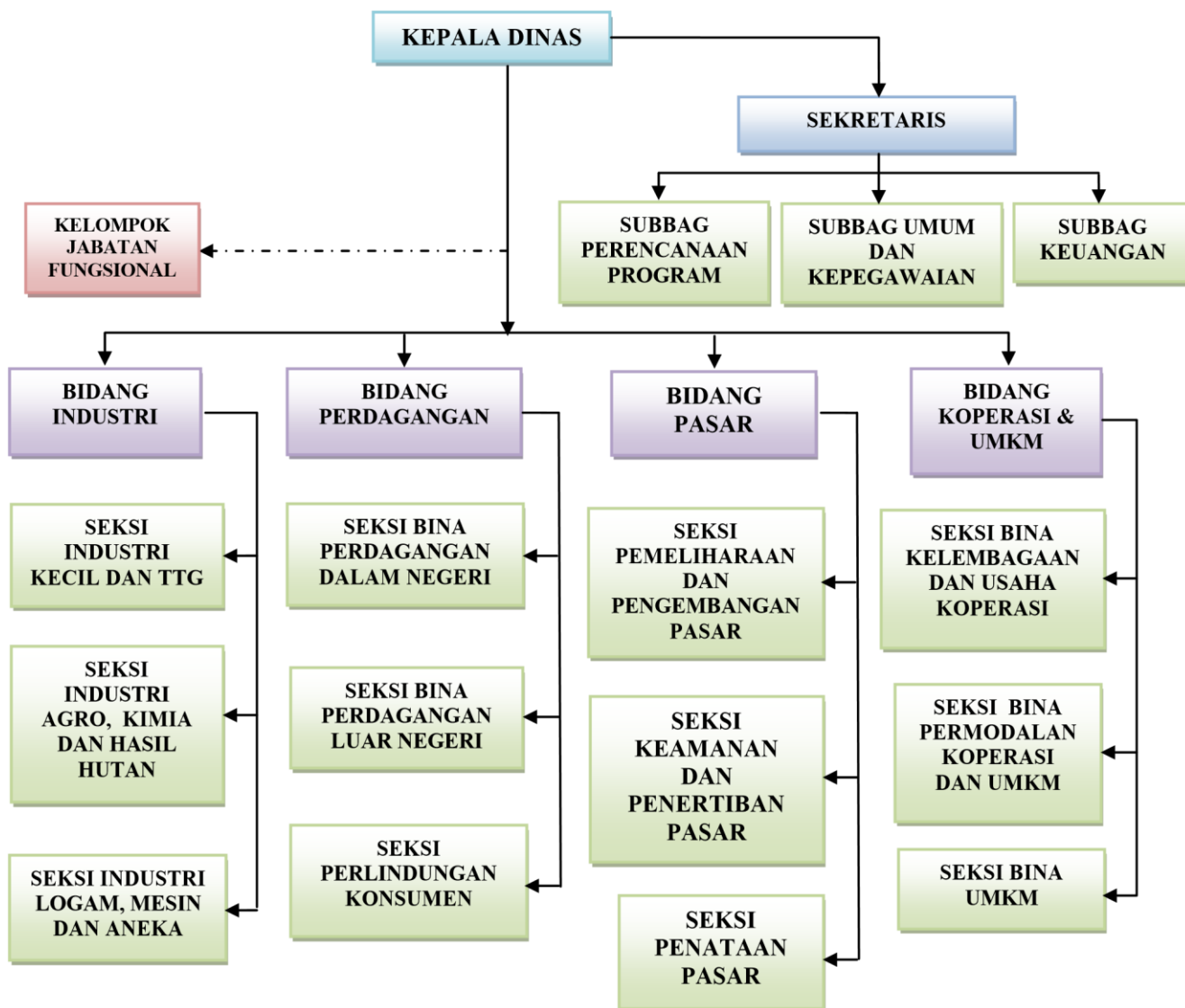
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau berdasarkan Keputusan Bupati Malinau nomor 43 tahun 2016 menetapkan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris
 - a. Kasubag Penyusunan Program
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Industri
 - a. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Industri (ILMEA)
 - b. Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - c. Kepala Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
4. Kepala Bidang Perdagangan
 - a. Kepala Seksi Bina Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Kepala Seksi Bina Perdagangan Luar Negeri
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
5. Kepala Bidang Koperasi dan UKM
 - a. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil
 - b. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha koperasi
 - c. Kepala Seksi Bina Permodalan dan UMKM
6. Kepala Bidang Pasar
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan pasar
 - b. Kepala Seksi Keamanan dan Penertiban Pasar
 - c. Kepala Seksi Penataan Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Fungsional

Adapun pohon struktur OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAG
(Berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2016)



E. Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sampai dengan akhir Desember tahun 2021 memiliki aparatur sebanyak 45 orang dengan perincian 37 orang PNS dan 8 orang PTT. Aparatur PNS yang berpendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 5 orang. Sedang untuk PTT, yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 2 orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1

Daftar Sumber Daya Aparatur PNS dan PTT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	N a m a	Pangkat/Gol/ Ruang	Jenjang Pendidikan		Jabatan / Eselon
			Formal	Struktural	
1.	Tirusel STP, SE, M.Si	Pembina Utama Muda / IV c	S2	Dikpim II	Kepala Dinas/II B
2.	Rumulus, SE	Pembina/IV a	S1	Dikpim III	Kabid Industri & TTG /III B
3.	Dorlence, S.Kom, MM	Pembina/IV a	S2	Dikpim III	Kabid Koperasi & UMKM /III B
4.	Frans Tonapa, STP, M.Si	Pembina/IV a	S2	Dikpim III	Kabid Perdagangan /III B
5.	Nasion Udan, S.Pd, M.Si	Pembina/IV a	S2	Dikpim III	Kabid Pengelolaan Pasar / III B
6.	Aplina Agusthina, SE, MAP	Pembina/ IV a	S2	Dikpim IV	Kasubbag Keuangan /IVA
7.	Yuli Bane, SE, MAP	Pembina/ IV a	S2	Dikpim IV	Kasi Perlindungan Konsumen / IV A
8.	Ronald Pirade, S. Hut, MAP	Pembina/ IV a	S1	-	Kasi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan/IVA
9.	Syahrani, SE, M.Si	Pembina / IV a	S2	Dikpim IV	Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar/ IVA
10.	Juraidah, SE	Penata Tk I / III d	S1	Dikpim IV	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / IV A
11.	Aprianus Jemi, SE	Penata Tk I / III d	S1	-	Kasi Teknologi Tepat Guna (TTG) / IV A
12.	Deni Hermawan, SE, M.Si	Penata Tk I / III d	S2	-	Kasi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi /IV A
13.	Efifana, SE	Penata Tk I / III d	S1	-	Kasi Bina Usaha UMKM / IV A
14.	Maria Ulfah, SE	Penata Tk I / III d	S1	Dikpim IV	Kasi Perdagangan Luar Negeri / IV A
15.	Dewi Fanri, SE	Penata / IIIc	S1	-	Kasubbag Penyusunan Program/IVA
16.	Arnest, SE	Penata / III c	S1	-	Kasi Keamanan dan Penertiban Pasar /IV A
17.	Yohanes Along, A.Md	Penata / III c	D3	-	Kasi Penataan Pasar/IV A
18.	Roy Alson, SE	Penata / III c	S1	Dikpim IV	Kasi Bina Perdagangan Dalam Negeri / IV A
19.	Gangsar Arianto, ST	Penata / III c	S1	-	Staf

20.	Risma Novianti, SE	Penata / III c	S1	-	Staf
21.	Isnaniah, S.Tr.P	Penata / III c	D3	-	Staf
22.	Abraham Lawai, SE	Penata / III c	S1	-	Staf
23.	Elia Ding, S.Sos.,M.Si	Penata Muda Tk.I /IIIb	S2	Dikpim IV	Kasi Bina Permodalan UMKM / IV A
24.	Ariyati Ningsih, A.Md	Penata Muda Tk I/III b	D3	-	Staf
25.	Sorlena, SE	Penata Muda Tk I/III b	S1	-	Staf
26.	Sarpinah, SE	Penata Muda Tk I/III b	S1	-	Staf
27.	Joni Khanady	Penata Muda Tk I/ III b	SLTA	-	Staf
28.	Markus, S.Sos	Penata Muda Tk I/ III b	S1	-	Staf
29.	Reminis Agerita, S.Tr.Akun	Penata Muda/ III a	S1	-	Staf
30.	Masdar, SH	Penata Muda / III a	S1	-	Staf
31.	Susilawati, S.Tr. Akun	Penata Muda / III a	S1	-	Staf
32.	Harnawan, SE	Penata Muda / III a	S1	-	Staf
33.	Cristian Andy Ishak, A.Md	Pengatur Tk I/ II d	D3	-	Staf
34.	Harlian	Pengatur Tk I/ II d	SLTA	-	Staf
35.	Efendi Irawan	Pengatur TK I/ II d	SLTA	-	Staf
36.	David	Pengatur Muda Tk I / II b	SLTA	-	Staf
37.	Saripudin	Pengatur Muda Tk I / II b	SLTA	-	Staf
38.	Andini Perdanasari, S.S	PTT dinas	S1	-	Staf
39.	Dewi Ratna Sari, STP	PTT dinas	S1	-	Staf
40.	Jemmi, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
41.	Immanuel Hadi Kristiyanto, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
42.	Rena Cicilia, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
43.	Gebby Yolanda Cloudia, A.Md. TI	PTT dinas	D3	-	Staf
44.	Jenny	PTT dinas	SLTA	-	Staf
45.	Mardiana	PTT dinas	SLTA	-	Staf

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau Tahun 2021

F. Isu Strategis (Strategic Issue) Yang Dihadapi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya pada sektor perekonomian, berbagai macam tantangan yang dihadapi semakin beragam dan berat seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Beberapa Isu Strategis tersebut adalah :

1. Letak Kabupaten Malinau yang cukup jauh dari pusat perekonomian khususnya Kota Tarakan, ketergantungan terhadap barang-barang kebutuhan cukup tinggi sehingga menimbulkan biaya distribusi yang tinggi (High cost distribution) dari

dan ke Malinau. Hal ini menyebabkan harga jual barang menjadi mahal dan memicu ekonomi biaya tinggi (high cost economic). Efek lainnya adalah ongkos produksi bagi produk lokal yang sebagian besar menggunakan bahan baku dari luar menjadi tinggi pula. Tingginya biaya produksi tersebut mengakibatkan produk dari Kabupaten Malinau sampai saat ini masih belum mampu bersaing dengan produk dari luar yang biaya produksinya rendah sehingga pasarpun masih dikuasai oleh produk dari luar daerah. Bahkan ada produk yang kandungan lokalnya sudah 100 % tapi harga jualnya masih tinggi. Hal ini karena biaya overhead-nya yang tinggi seperti bahan penolong dan upah buruh. Contohnya : meubel (meja dan kursi) dari kayu, aneka roti tawar, aneka barang cetakan seperti baliho, spanduk, dll. Harga jualnya masih tinggi dibanding produk sejenis dari Tarakan maupun pulau Jawa.

2. Beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau lokasinya sangat terpencil dengan desa-desanya yang tersebar dan saling berjauhan serta sarana transportasi yang sangat terbatas. Sebagian besar barang kebutuhan masyarakat diangkut melalui sungai dan ada yang hanya bisa diangkut melalui udara dengan jumlah yang sangat terbatas. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam pendistribusian barang baik dari sisi jumlah maupun biaya angkut. Tentu saja harga jual barang di lokasi tersebut melonjak sangat tinggi dan ini sangat memberatkan masyarakat. Hingga saat ini sebagian besar kegiatan perekonomian masih berpusat di ibu kota kabupaten dan kecamatan terdekat saja. Belum merata sampai ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa terpencil. Tentu saja terjadi kesenjangan yang sangat besar. Ini merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi pemerataan.
3. Perkembangan koperasi di Kabupaten Malinau hingga saat ini masih rendah dan banyaknya koperasi-koperasi yang macet/tidak aktif. Masih lemahnya kemampuan SDM koperasi dan kurangnya modal usaha sehingga banyak koperasi yang sulit untuk berkembang. Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil, perkembangan usahanya cukup baik. Kendala utama bagi mereka adalah akses modal yang sangat terbatas. Saat ini sudah ada program Pemerintah Daerah yakni program perkuatan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil namun jumlah dana yang disalurkan masih sangat terbatas karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Sehingga hanya sebagian kecil saja dari pelaku usaha mikro dan kecil yang bisa dibantu dari sisi permodalan.

G. Perkembangan Usaha Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM di Kabupaten Malinau Tahun 2021

1. Sektor Industri

a. Perkembangan Usaha

Pertumbuhan industri di Kabupaten Malinau tahun 2021 cukup baik disaat Pandemi Covid 19 sedang melanda dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Berbagai kebijakan dan peraturan yang telah pemerintah keluarkan untuk menekan laju penularan virus Covid 19 seperti PPKM dan sebagainya memang berdampak pada pertumbuhan di sektor ekonomi. Kendatipun demikian, sektor yang menguasai hajat hidup manusia ini terbukti cukup tangguh untuk bertahan ditengah guncangan badai Pandemi Covid 19. Pertumbuhan industri di Kabupaten Malinau masih tetap berlangsung dan tumbuh sebagaimana layaknya situasi normal. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat daerah-daerah lain keadaannya cukup memprihatinkan bahkan ada yang sangat menurun. Tahun 2021 yang telah lewat merupakan tahun yang sulit bagi sebagian pengusaha khususnya pada sektor industri. Beruntung di Kabupaten Malinau masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga saat ini sektor industri masih didominasi oleh pelaku usaha kecil. Sumber daya alam yang melimpah semestinya merupakan modal utama untuk berkembang. Namun potensi tersebut belum bisa diolah secara optimal karena rendahnya kualitas SDM pelaku usaha lokal dalam penguasaan iptek modern, manajemen usaha dan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha.

Profil Industri di Kab. Malinau bersifat padat karya dengan fasilitas peralatan sederhana dan manual sehingga kapasitas produksi masih terbatas. Namun dengan kesederhanaan tersebut jumlah usaha industri di Kabupaten Malinau masih bias tumbuh dan berkembang. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2
Data Perkembangan Jumlah Industri di Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Tahun (unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Malinau Kota	99	98	195	194	307
2.	Malinau Utara	117	112	177	177	272
3.	Malinau Barat	80	80	192	214	240
4.	Mentarang	99	99	104	109	149
5.	Malinau Selatan	35	101	88	105	107

6.	Malinau Selatan Hulu	20	20	20	20	20
7.	Malinau Selatan Hilir	126	126	143	163	166
8.	Mentarang Hulu	9	9	9	9	11
9.	Pujungan	8	8	8	8	8
10.	Kayan Hulu	22	22	22	22	22
11.	Kayan Selatan	39	39	39	39	39
12.	Kayan Hilir	20	20	104	104	104
13.	Sungai Tubu	14	14	14	14	16
14.	Sungai Boh	25	25	25	25	25
15.	Bahau Hulu	51	51	51	51	51
Jumlah		764	824	1191	1254	1539

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021

Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal 5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving 2. Moulding
4.	Kerajinan	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
5.	Furniture	1. Meubelair
6.	Konveksi	1. Penjahitan

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021

Rekapitulasi data industri perkecamatan se-Kab. Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
Rekapitulasi Data Industri di 15 Kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Industri (unit)
1.	Malinau Kota	307
2.	Malinau Utara	272
3.	Malinau Barat	240
4.	Mentarang	149
5.	Malinau Selatan	107
6.	Malinau Selatan Hulu	20
7.	Malinau Selatan Hilir	166
8.	Mentarang Hulu	11
9.	Pujungan	8
10.	Kayan Hulu	22
11.	Kayan Selatan	39
12.	Kayan Hilir	104
13.	Sungai Tubu	16
14.	Sungai Boh	25
15.	Bahau Hulu	51
	Jumlah	1539

b. Jumlah Investasi Sektor Industri

Investasi sektor industri di Kabupaten Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5
Data Investasi Sektor Industri tahun 2021

NO	KECAMATAN	TAHUN (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Malinau Kota	4.955.450.000	4.945.450.000	13.051.300.000	12.966.300.000	13.801.250.000
2	Malinau Utara	2.490.000.000	2.358.600.000	2.964.760.000	2.964.760.000	4.439.760.000
3	Malinau Barat	163.491.000.000	163.491.000.000	165.499.000.000	165.918.000.000	166.010.850.000
4	Mentarang	1.746.500.000	1.746.500.000	1.775.500.000	1.819.500.000	2.112.000.000
5	Malinau Selatan	338.100.000	2.752.310.000	2.088.500.000	2.407.500.000	2.410.500.000
6	Malinau Selatan Hulu	279.000.000	279.000.000	279.000.000	279.000.000	279.000.000
7	Malinau Selatan Hilir	1.542.500.000	1.542.500.000	3.083.000.000	3.262.000.000	3.292.100.000
8	Mentarang Hulu	63.900.000	63.900.000	63.900.000	63.900.000	73.900.000
9	Pujungan	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000
10	Kayan Hulu	1.125.640.000	1.125.640.000	1.125.640.000	1.125.640.000	1.125.640.000
11	Kayan Selatan	1.358.900.000	1.358.900.000	1.358.900.000	1.358.900.000	1.358.900.000
12	Kayan Hilir	433.750.000	433.750.000	1.122.750.000	1.122.750.000	1.122.750.000
13	Sungai Tubu	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	18.250.000

14	Sungai Boh	352.500.000	352.500.000	352.500.000	352.500.000	352.500.000
15	Bahau Hulu	346.700.000	346.700.000	346.700.000	346.700.000	346.700.000
JUMLAH		178.717.590.000	180.990.400.000	193.305.100.000	194.181.100.000	196.923.500.000

Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

2. Sektor Perdagangan

a. Perkembangan Usaha Dagang

Pertumbuhan usaha dagang di Kabupaten Malinau hingga akhir tahun 2021 cukup baik ditengah bergejolaknya wabah PANDEMI Covid 19. Peran sektor perdagangan sangat besar bagi kemajuan daerah Kabupaten Malinau karena sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Berdasarkan data tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6
Perkembangan Jumlah Usaha Dagang di Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Tahun (unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Malinau Kota	1435	1435	1435	1.331	933
2	Malinau Utara	100	100	100	168	433
3	Malinau Barat	193	193	193	275	364
4	Mentarang	64	64	64	83	119
5	Malinau Selatan	50	50	50	53	94
6	Malinau Selatan Hulu	10	10	10	10	17
7	Malinau Selatan Hilir	15	15	15	27	64
8	Mentarang Hulu	5	5	5	6	10
9	Pujungan	19	19	19	20	29
10	Kayan Hulu	23	23	23	21	71
11	Kayan Selatan	20	20	20	18	27
12	Kayan Hilir	12	12	12	12	27
13	Sungai Tubu	5	5	5	5	18
14	Sungai Boh	17	17	17	24	14
15	Bahau Hulu	18	18	18	19	21
Jumlah		1986	1986	1986	2072	2301

Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah pedagang di Kabupaten Malinau telah mencapai 2301 orang. Peningkatan jumlah terjadi di beberapa kecamatan terdekat dan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Untuk melihat rincian jumlah usaha dagang perkecamatan se Kab. Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7
Potensi Sektor Perdagangan Per Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021

No	Wilayah	Skala Usaha	Jumlah Usaha (unit)
1.	Kecamatan Malinau Kota	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	915 33 45 -
JUMLAH			993
2.	Kecamatan Malinau Utara	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	425 6 2 -
JUMLAH			433
3.	Kecamatan Malinau Barat	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	346 16 - -
JUMLAH			364
4.	Kecamatan Malinau Selatan	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	94 - - -
JUMLAH			94
5.	Kecamatan Mentarang	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	116 3 - -
JUMLAH			119
6.	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	64 - - -
JUMLAH			64
7.	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	17 - - -
JUMLAH			17
8.	Kecamatan Pujungan	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	29 - - -
JUMLAH			29

9.	Kecamatan Kayan Hulu	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	60 16 - -
JUMLAH			71
10.	Kecamatan Kayan Hilir	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	23 4 - -
JUMLAH			27
11.	Kecamatan Sungai Boh	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar e. Besar	14 - - -
JUMLAH			14
12.	Kecamatan Kayan Selatan	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	27 - - -
JUMLAH			27
13.	Kecamatan Bahau Hulu	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	21 - - -
JUMLAH			21
14.	Kecamatan Mentarang Hulu	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	10 - - -
JUMLAH			10
15.	Kecamatan Sungai tubu	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	18 - - -
JUMLAH			18
JUMLAH TOTAL			2.301

Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

TABEL 8
Rekapitulasi data jumlah pedagang per Kecamatan se Kab. Malinau tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah (unit)
1.	Malinau Kota	933
2.	Malinau Utara	433
3.	Malinau Barat	364
4.	Mentarang	119

5.	Malinau Selatan	94
6.	Malinau Selatan Hulu	17
7.	Malinau Selatan Hilir	64
8.	Mentarang Hulu	10
9.	Pujungan	29
10.	Kayan Hulu	71
11.	Kayan Selatan	27
12.	Kayan Hilir	27
13.	Sungai Tubu	18
14.	Sungai Boh	14
15.	Bahau Hulu	21
JUMLAH		2.301

b. Perkembangan Investasi sektor Perdagangan

Prediksi jumlah investasi di sektor perdagangan untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 9
Jumlah Investasi pada Sektor Perdagangan

No.	Tahun	Jumlah Usaha	Investasi
1	2017	1986	Rp. 63.595..000.000,-
2	2018	1986	Rp. 63.595..000.000,-
3	2019	1986	Rp. 63.595..000.000,-
4	2020	2072	Rp. 67.895.000.000 ,-
5	2021	2301	Rp. 68.500.000.000,-

Sumber : Dinas Perindag Kab.Malinau tahun 2021

2. Sektor Koperasi dan UMKM

a. Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 129 unit. Data tersebut masih sama dengan data tahun 2020. Belum ada penambahan jumlah koperasi baru di tahun 2021. Keragaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10
DATA NAMA KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN SE KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021

No	Nama Koperasi	Alamat		Badan Hukum		Jenis Usaha	Keterangan	
		Jalan	Kecamatan	Nomor	Tanggal		Aktif	Tdk Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEC. MALINAU KOTA								
1	KSU. Maya Taka	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	04/BH/Perindagkop/I/2002	29/01/2002	USP, BBM	Aktif	-
2	KSU. Pagun Taka	JL. Panembahan RT. III	Malinau Kota	16/BH/Perindagkop/XII/2003	16/11/2003	USP, Sarang	Aktif	-
3	KSU. Sejahtera	Batu Lidung	Malinau Kota	22/BH/Perindagkop/X/2005	24/10/2005	USP, Jasa, Sembakau	Aktif	-
4	KSU. Pakuaja	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	016/BH/Perindagkop/VI/2003	02/06/2003	USP, Kredit Tanah	Aktif	-
5	KSU. Cahaya Mulya	Jl. Duyan RT. III Desa Malkot	Malinau Kota	36/BH/Perindagkop/II/2007	07/02/2007	USP Sembakau	-	TA
6	KSU. Persekutuan Dayak	Jl. Ahmad Kosasi RT. II Malkot	Malinau Kota	38/BH/Perindagkop/VI/2007	14/06/2007	Sembakau	-	TA
7	KSU. Bayangkara	Jl. Pusat Perkantoran (Polres)	Malinau Kota	41/BH/Perindagkop/IX/2007	19/09/2007	USP, Jasa, Sembakau	Aktif	-
8	KSU. Gerakan Hati Bangsa	Desa Pelita Kanaan	Malinau Kota	068/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2011	14/09/2011	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
9	KSU. Sangkutu Bane	Jl. Swadaya Malinau Kota	Malinau Kota	34/BH/Perindagkop/IX/2006	17/09/2006	Saprodi	-	TA
10	KSU. Anak Pantai	Malinau Kota	Malinau Kota	23/BH/Perindagkop/II/2006	12/02/2006	Pengecer BBM	-	TA
11	Koptan. Intulun	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	144/BH/KDK/17.3/VIII/2000	07/08/2002	USP	-	TA
12	KPN. Wana Jaya	Jl. Pusat Pemerintahan Malinau	Malinau Kota	047/BH/Perindagkop/XI/2008	06/11/2008	USP	Aktif	-
13	Kopkut Darat. Rukun Lestari	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	051/BH/Perindagkop/VI/2003	02/03/2003	Angkutan	Aktif	-
14	Kopwan. Karya Wanita	Kantor PKK Kab. Malinau	Malinau Kota	014/BH/Perindagkop/VI/2002	11/06/2002	USP, Sembakau, RM	Aktif	-
15	Kopsek. Handayani SMPN 1	SMPS. N. 1 Malinau Kota	Malinau Kota	017/BH/Perindagkop/XI/2003	16/11/2003	ATK	Aktif	-
16	Kopdit. CU. Femung Pebaya	Jl. Pelita Kanaan	Malinau Kota	109/BH/PAD/Perindagkop&UMKM/VIII/2015	28/7/2015	USP	Aktif	-
17	KPN. Mafit Jaya	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	010/BH/Perindagkop/VI/2002	10/06/2002	USP, Toko	Aktif	-
18	Koperasi Simpan Pinjam TAAN TOU	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	39/BH/Perindagkop/VIII/2007	13/08/2007	USP	Aktif	-
19	Koperasi Malinau Sejahtera	Jl. Pusat Perkantoran (Kodim 0910)	Malinau Kota	90/BH/Perindagkop/II/2014	8/1/2014	USP, Toko	Aktif	-
20	Kop. Peternak Intimung Satria Mandiri	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	059/BH/Perindagkop/XI/2010	03/11/2010	Peternakan	-	TA
21	Koptanbun Persatuan Rakyat	Jl. Panembahan Malinau Kota	Malinau Kota	132/BH/KDK/17.3/VI/2000	10/06/2000	Kehutanan	-	TA
22	Koppas Swakarsa	JL. Panembahan RT	Malinau Kota	127/BH/KDK/17.3/VI/2000	29/05/2000	USP	-	TA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

23	Koptanbun. Tanah Tepun	Desa Pelita Kanaan	Malinau Kota	79/BH/KDK/17.3/VIII/1999	02/08/1999	USP, Sembko	-	TA
24	Kopontren. Amanah	Jl. Swadaya Malinau Kota	Malinau Kota	24/ BH/Perindagkop/II/2006	09/02/2006	Sembako	-	TA
25	KSU Udip Mading	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	110/BH/Perindagkop&UMKM/VIII/2015	01/07/2015	-	Aktif	-
26	KSU Tirta Intimung	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	111/BH/Perindagkop&UMKM/XI/2015		-	Aktif	-
27	Koptan.Pandan Lestari	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	308/BH/Prindagkop & UMKM/XII/2013	17/12/2013	USP.Jasa Angkutan	Aktif	-
28	Kop. Pasar Buah GERDEMA	Malinau Kota	Malinau Kota	100/BH/Prindagkop & UMKM/II/2014	23/01/2014	Jasa,Pemasaran	Aktif	-
29	Koptan. Gotong Royong	Desa Kabiran	Malinau Kota	68/BH/KDK/17.3/VI/2000	22/06/2000	USP, Saprodi	-	TA
30	Koptan. Teguh Karya	Desa Tanjung Keranjang	Malinau Kota	144/BH/KDK/17.3/VII/2000	07/08/2000	USP, Saprodi	Aktif	-
31	Kop. Jasa SMAN 1 Malinau	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	104/BH/Perindagkop&UMKM/II/2014	20/5/2014	-	Aktif	-
32	KSU Distakot Malinau	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	105/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2014	16/9/2014	-	Aktif	-
33	Koperasi Seludan Jaya	Tanjung Keranjang	Malinau Kota	108/BH/XXXIV.4/III/2015	23/3/2015	-	Aktif	-
34	Kop. Putra Buluk	Jl. AMD RT 18	Malinau Kota	112/BH/Perindagkop&UMKM/XII/2015	30/12/2015	-	Aktif	-
35	KSU. Mitra Karya Jaya	Jl. AMD (gg. H.Kadir) RT.18 Malkot	Malinau Kota	008317/BH/m.KUM.2/VI/2018	05/04/2018	USP, Toko,	Aktif	-
36	KSU. Godam Pebaya Sejahtera	Jl. Raja Pandita RT. 10, Malinau Hulu	Malinau Kota	9835/BH/M.KUMKM.2/IX/2018	26/07/2018	Pertanian, sembako	Aktif	-
37	KSP. Putra Mandiri Borneo	Malinau Kota	Malinau Kota	AHU-0005734.AH.01.26.TAHUN 2020	07/10/2020	USP	Aktif	-
38	Kop. Jasa Avia Bandara Malinau	Jl. Raja Pandita, Malinau Kota	Malinau Kota	AHU-0006017.AH.01.26.TAHUN 2020	22/10/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
39	Koperasi Jasa Malinau Maju Sejahtera	Jalan Pusat Pemerintahan 010/000	Malinau Kota	AHU-0002621.AH.01.26.TAHUN 2020	05/03/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
40	Koperasi Jasa Pramuka Jaya Malinau	Jalan Pusat Pemerintahan	Malinau Kota	AHU-0007320.AH.01.26.TAHUN 2020	16/12/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
		Jumlah	40				29	11
KEC. MALINAU UTARA								
41	KSU. Pebaya Mulun	Kelapis	Malinau Utara	049/BH/Perindagkop/XII/2008	18/12/2008	Sembako	-	TA
42	KSU. Ferurung	Desa Kelapis	Malinau Utara	25/BH/Perindagkop/IV/2006	04/04/2006	Sembakau	Aktif	-
43	KSU. Rindang	Kantor Camat Mal-Utara	Malinau utara	051/BH/Perindagkop/V/2009	01/05/2009	Indus Kripik	Aktif	-
44	KSU. Andika Jaya Putra	Jl. RSU. RT. VI Respen	Malinau utara	063/BH/Perindagkop & UMKM/IV/2011	04/04/2011	Perdagangan	Aktif	-
45	KSU. Fajar Diniar	Jln. Abd Hasan RT. 01	Malinau Utara	064/BH/Perindagkop & UKM/IV/2011	04/04/2011	Perdagangan	Aktif	-
46	KSU. Bersama Karya Bata	Jl. SPP RT. 01	Malinau utara	065/BH/Perindagkop & UKM/IV/2011	04-04:2011	Ind. Batu bata	-	TA
47	KSU. Keluarga Jaya Amdal Mandiri	Desa Malinau Seberang	Malinau utara	066/BH/Perindagkop & UKM/V/2011	25/05/2011	Perdagangan	Aktif	-
48	KSU. Ayam Bersama	Desa Kaliamak	Malinau Utara	069/BH/Perindagkop & UMKM/III/2012	28/3/2012	Peternakan	Aktif	-
49	KSU. Pemung tawai	Desa kelapis	Malinau Utara	061/BH/Perindagkop&UMKM/V/2011	18/02/2011	Pertanian, USP	-	TA

50	Koptan. Tarau Mandiri	Desa Respen	Malinau utara	02/BH/Perindagkop/X/2001	30/01/2001	Sembako	-	TA
51	Koptan. Tumu Bagu	Malinau Seberang	Malinau Utara	125/BH/KDK/17.3/IX/2000	08/09/2000	Sembako	-	TA
52	Koptan. Urip Jan	Desa Punan Setarap	Malinau Utara	26/BH/Perindagkop/IV/2006	17/05/2006	Pertanian	-	TA
53	Kop. Kartika	Belayan (Batalyon Yonif 614/RJP)	Malinau utara	055/BH/Perindagkop/VIII/2009	06/08/2009	USP, Toko	-	TA
54	KSU.Camar Bahagia	Jl.Maharaja Dinda RT.V Mal.Seberang	Malinau Utara	081/BH/Perindagkop/V/2013	05/06/2013	-	Aktif	-
55	Kop.TKBM Mekar Baru	Desa Kelapis Kec.Mal.Utara	Malinau Utara	082/BH/Perindagkop/VIII/2013	14/08/2013	-	Aktif	-
56	KSU.Soraya	Desa Belayan	Malinau utara	088/BH/Prindagkop & UMKM/XI/2013	11/11/2013	Sembako,Pertnian,BBM	-	TA
57	Koptan. Feruyung	Desa Lobak Manis	Malinau Utara	012/BH/Perindagkop/VI.2002	20/06/2002	USP, Taxi	Aktif	-
58	KSU. Tina Metuo Taha	Long Kenipe	Malinau Barat	20/BH/Perindagkop/II/2005	24/1/2005	-	-	TA
59	Kop. Jasa Putra Luso	Desa Luso	Malinau Utara	103/BH/Prindagkop & UMKM/V/2014	20/5/2014	-	-	TA
60	Koperasi Konsumen Madani Utama Sejahtera	Jl. Abdul Hasan	Malinau Utara	AHU-0003915.AH.01.26.TAHUN 2020	23/06/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
61	Koperasi Jasa Primer Kartika Raja Pandhita	Asmil Yonif 614/Rjp 004/000	Malinau Utara	AHU-0002023.AH.01.26.TAHUN 2020	05/02/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
		Jumlah	21				11	10
KEC. MALINAU BARAT								
62	Koptan. Gema Borneo Mandiri	Desa Kuala Lapang	Malinau Barat	007472/BH/M.KUKM.2/II/2018	22/2/2018	Pertanian	Aktif	-
63	KSU. Sejahtera Bersama	Kuala Lapang	Malinau Barat	054/BH/Perindagkop/ VI/2009	08/06/2009	Sembako, USP	Aktif	-
64	KSU. Sawit Mandiri	Jl. Singkir Karaganan RT. 01 Sesua	Malinau Barat	067/BH/Perindagkop & UMKM/V/2011	25/05/2011	Perkebunan	Aktif	-
65	KSU. Abadi	Tanjung Lapang	Malinau Barat	115/BH/KDK/17.3/III/2000	27/08/2000	USP	-	TA
66	Koptan. Suka Makmur	Desa Sesua	Malinau Barat	06/BH/Perindagkop/III/2005	23/03/2005	Sembako	-	TA
67	Kopbun. Rimbunan Hijau	Desa Sempayang	Malinau Barat	32/BH/Perindagkop/VIII/2006	17/07/2006	USP, Sembako	Aktif	-
68	Koppas Bhineka	Tanjung Lapang	Malinau Barat	003/BH/Perindagkop/II/2001	29/05/2001	USP	-	TA
69	Kopbun. Mulon Do	Desa Taras	Malinau Barat	31/BH/Perindagkop/VII/2006	17/07/2006	-	-	TA
70	Kop.Bun.Kuala Lapang Maju Sejahtera	Desa Kuala Lapang	Malinau Barat	077/BH/Perindagkop/II/2013	01/09/2013	Perkebunan	Aktif	-
71	Kop.Bun.Pelangi Sawit Sejahtera	Jl.Batu Narit RT.VI No.02 Tg.Lapang	Malinau Barat	078/BH/Perindagkop/II/2013	30/01/2013	Perkebunan	Aktif	-
72	Kop.Jasa Karya Bersama Unit.Sempayang	Desa Sempayang	Malinau Barat	086/BH/Perindagkop/X/2013	16/10/2013	Jasa	Aktif	-
73	Kop. Bun Bengalun Sejahtera	Desa Sesua	Malinau Barat	076/BH/Perindagkop & UMKM/II/2013	01/09/2013	Perkebunan	Aktif	-
74	Kop. Jasa Maju Bersama	Desa Kuala lapang	Malinau Barat	087/BH/Prindagkop & UMKM/X/2013	20-10-2013	Pemasaran	Aktif	-
75	Koptan. Hutan Emas	Tanjung Lapang	Malinau Barat	69/BH/KDK/17.3/V/1999	24/06/1999	USP, Toko	-	TA

76	Koptan. Pebaya Tau	Kuala Lapang	Malinau Barat	30/BH/Perindagkop/ V/2006	10/05/2006	USP, Saprodi	-	TA
77	KSU SMKN 1 Malinau	Desa Tanjung Lapang	Malinau Barat	101/BH/Perindagkop&UMKM/II/2014	25/2/2014	-	Aktif	-
78	Koperasi Malinau Sawit Abadi	Tanjung Lapang	Malinau Barat	106/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2014	26/9/2014	Perkebunan	Aktif	-
79	KSU. Busak Baku	Jln. Pinus Rt XIII Tanjung Lapang	Malinau Barat	37/BH/Perindagkop/VI/2007	14/06/2007	Jasa,	Aktif	-
80	Kopkar PT. Inhutani Kaltara	Tanjung Lapang Rt. 12	Malinau Barat	107/BH/XXXIV.4/II/2015	27/2/2015	-	Aktif	-
		Jumlah	19				13	6
KEC. MENTARANG								
81	KSU. Gerbang Dema	Pulau Sapi	Mentarang	42/BH/Perindagkop/VI.2008	19/11/2008	Penapung beras	Aktif	-
82	Koptan Sri Agung	Desa Singai Terang	Mentarang	007/BH/Perindagkop/IV/2002	04/04/2002	USP, Sembako	Aktif	-
83	Koptan. Paking Maju	Desa Paking	Mentarang	04/PAD/BH/Perindagkop/VII/03	07/07/2003	Sembako	Aktif	-
84	Koptanbun. Keluarga Usaha Baru	Lidung Keminci	Mentarang	013/BH/Perindagkop/VI/2002	30/06/2002	Sembako, USP	Aktif	-
85	Koptan. Supinara	Pulau Sapi	Mentarang	184/BH/KDK 17.3/II/2001	28/02/2001	-	-	TA
86	Koptan. Pantai Bahagia	Mentarang Baru	Mentarang	181/BH/KDK 17.3/VI/2000	02/06/2000	-	-	TA
87	KUD. Pertanian	Pulau Sapi	Mentarang	108/BH/PAD/K.Wk/II/1996	03/06/1996	-	-	TA
88	Kop. Wanita Tani Wanita	Lidung Keminci	Mentarang	008249/BH/M.KUKM.2/IV/2018	24/04/2018	Jasa	Aktif	-
		Jumlah	8				5	3
MALINAU SELATAN								
89	Koptanbun. Gunung Sidi	Langap	Malinau Selatan	166/BH/KDK/17.3/XI/2000	11/10/2000	-	-	TA
90	KSU. Metui	Gong Solok	Malinau Selatan Hilir	39/BH/KDK.17.3/VII/1998	07/07/1998	Sembako	Aktif	-
91	KSU. Laue Terig Lestari	RT. I Gong Solok	Malinau Selatan Hilir	057/BH/Perindagkop/VIII/2010	23/08/2010	USP, Jasa Anakutan	Aktif	-
92	KSU. Saban Hari	Desa Punan Gong Solok	Malinau Selatan Hilir	058/BH/Perindagkop/VIII/2010	31/08/2010	USP, Jasa Angkut	Aktif	-
93	Kop.Bun.Cahaya Rian	Desa Punan Rian Kec.Malinau Selatan	Malinau Selatan Hilir	079/BH/Perindagkop/II/2013	30/01/2013	-	Aktif	-
94	KSU.Lampun Sakti	Desa Bila Bekayuk	Malinau Selatan	080/BH/Perindagkop/II/2013	02/04/2013	-	Aktif	-
95	KSU. Usaha Bersama	Desa Langap	Malinau Selatan	071/BH/Perindagkop & UMKM/IV/20112	16/4/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
96	KSU.Bina Mandiri	Desa Long Adiu	Malinau Selatan	071/BH/Perindagkop & UMKM/IV/2012	16/4/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
97	KSU. Ca Kimet	Desa Loreh	Malinau Selatan	44/BH/Perindagkop/VI/2008	10/06/2008	Sembako, USP	-	TA
98	KSU Gerbang Dema	Long Loreh	Malinau Selatan	054/BH/Perindagkop/ VI/2009	08/06/2009	USP,Jasa Sembako	-	TA
99	Koptan Fajar Baru	Desa Sengayan	Malinau Selatan	141/BH/KDK.17.3/VII/2000	18/07/2000	USP	-	TA
100	Kop.Jasa Bina Usaha	Desa Batu Kajang Mal.Selatan Hilir	Malinau Selatan Hilir	084/BH/Perindagkop/IX/2013	09/03/2013	Jasa	Aktif	-

101	KSU. Desa Naha Kramo Jaya Mandiri	Desa. Naha Krano	Malinau Selatan Hulu	083/BH/Perindagkop/VIII/2013	14/08/2013	-	Aktif	-
102	Kop. Produsen. Benuang Bara Loreh Masela	Jl. Gerdema RT.8 Ds. Lg. Loreh	Malinau Selatan	AHU-0006991.AH.01.26.Tahun 2020	02/12/2020	Produsen	Aktif	-
		Jumlah	14				10	4
MENTARANG HULU								
103	KSU. Gerbang Dema Belau Indah	Mentarang Hulu	Mentarang Hulu	025/Perindagkop/VI/2009	30/05/2009	USP, Toko	Aktif	-
		Jumlah	1				1	0
SUNGAI BOH								
104	KSU. Pemung Tawai	Mahak Baru	Sungai BOH	005/BH/Perindagkop/II/2002	30/04/2002	Sembako	Aktif	-
105	KSU. Mudip Mading	Desa Agung Baru	Sungai BOH	27/BH/Perindagkop/IV/2006	28/04/2006	Sembako	Aktif	-
106	KSU. Ledung Mading	Sungai Boh	Sungai BOH	45/BH/Perindagkop/VIII/2008	19/08/2008	Sembako	Aktif	-
107	KSU. Sumber Makmur	Desa Agung Baru	Sungai BOH	072/Perindagkop & UMKM/2012	14/5/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
		Jumlah	4				4	0
PUJUNGAN								
108	KSU. Bangen Tawai	Desa Long Bena	Pujungan	062/BH/Perindagkop & UMKM/III/2011	07/03/2011	Sembako, USP	Aktif	-
109	KUD. Bawane	Long Pujungan	Pujungan	175a/BH/PAD/KDK.17/VI/1997	15/04/1997	Sembako, Pertanian	-	TA
110	Kop. Distribusi Sahabat Setia	Desa Long Apan	Pujungan	10/BH/PAD/Perindagkop/VI/06	04/05/2006	Sembako, BBM	Aktif	-
111	Koptan Rimba Harapan	Desa Long Lame	Pujungan	35/BH/Perindagkop/II/2007	21/12/2000	-	-	TA
112	KSU Bangen Tawai	Desa Long Bena	Pujungan	085/BH/Perindagkop/IX/2013	09/11/2013	-	Aktif	-
		Jumlah	5				3	2
KEC. BAHAU HULU								
113	KSU. Bahau Hulu	Desa Long Alango	Bahau Hulu	050/BH/Perindagkop/III/2009	04/03/2009	Sembako, Pertanian	Aktif	-
114	Koptan. Mekar Jaya	Long Tebulo	Bahau Hulu	011/BH/Perindagkop/VII/2002	18/03/2002	Pertanian	-	TA
		Jumlah	2				1	1
KEC. KAYAN HILIR								
115	KUD. Bangun	Long Pipa	Kayan Hilir	1015/BH/17	17/08/1945	-	-	TA
116	KSU. Tunas Harapan	Desa Long Metun	Kayan Hilir	060/BH/Perindagkop/II/11	14/02/2011	Sembako	Aktif	-
117	KSU. Data benuang	Long Sule	Kayan Hilir	041/BH/Perindagkop/XII/2007	14/12/2007	Sembako, Kerajinan	Aktif	-
118	KSU. Gerbang Dema	Data Dian	Kayan Hilir	48/BH/Perindagkop/XI/2008	19/11/2008	Sembako	Aktif	-

119	KSU.Perintis	Desa Long Pipa	Kayan Hilir	074/BH/Perindagkop & UMKM/VII/2012	9/7/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
		Jumlah	5				4	1
KEC. KAYAN HULU								
120	KSU.Bendungan Indah	Desa Sei Barang	Kayan Hulu	074/BH/Perindagkop & UMKM/XII/2012	20/1/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
121	KSU. Bina Usaha Bersama	Desa Long Top	Kayan Hulu	001/BH/Perindagkop/X/2001	20/10/2001	Sembako	-	TA
122	KSU. Bangen Tawai	Desa Long Lebusan	Kayan Hulu	011/BH/Perindagkop/II/2003	09/07/2002	Sembako, Pertanian	-	TA
123	KUD. Long Nawang	Desa Long Nawang	Kayan Hulu	03/PAD/Perindagkop/II/2003	09/01/2003	Sembako	Aktif	-
124	Koptan Gendingan Apo Kayan	Desa Long Lebusan	Kayan Hulu	011/BH/Perindagkop/II/2003	09/07/2002	Sembako, Pertanian	-	TA
125	Koptanbun. Perubahan Usaha Baru	Desa Apo Kayan	Kayan Hulu	18/BH/Perindagkop/XI/2003	24/11/2003	Sembako	-	TA
		Jumlah	6				2	4
KAYAN SELATAN								
126	KSU. Senguyun	Long Apung	Kayan Selatan	033/BH/Perindagkop/II/2001	02/02/2001	Sembako		TA
127	KSU. Peteneg Udip	Desa Long Uro	Kayan Selatan	40/BH/Perindagkop/VIII/2007	13/08/2007	Pertanian		TA
128	Koperasi Jasa Angkasa Ampung Sejahtera	Long Apung	Kayan Selatan	AHU-0000294.AH.01.26 Tahun 2019	14/11/2019	Ksu Angkutan Darat, Kargo, JPT, EMPU	Aktif	-
129	KPN. Harapan Jaya	Long Apung	Kayan Selatan	43/BH/Perindagkop/VI/2008	10/06/2008	Sembako, USP		TA
		Jumlah	4				1	3
		Jumlah Total	129				84	45

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa :

- **Usaha Mikro adalah** : usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Contohnya : pedagang asongan/keliling, pedagang lapakan di pasar, pedagang kaki lima, usaha jasa pangkas rambut, Bengkel sepeda pinggir jalan, dll

- **Usaha Kecil adalah** : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contohnya : usaha binatu/loundry, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan lain sebagainya.

- **Usaha Menengah adalah** : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Contohnya : perusahaan pembuat roti skala menengah, restoran besar, toko bangunan, toko elektronik, mini market, dll

Dari uraian diatas beserta contohnya maka dapat disimpulkan bahwa lingkup usaha UMKM yang terbanyak ada pada sektor industri dan perdagangan.

Data lima tahun terakhir (2017 – 2021) perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 11
Perkembangan Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau
(Tahun 2017 – 2021)

No	Skala Usaha	Tahun (Unit)									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.
1.	Mikro	762	1773	822	1773	1189	1773	1252	1775	1537	2176
2.	Kecil	1	200	1	200	1	200	1	252	1	78
3.	Menengah	1	13	1	13	1	13	1	45	1	47
J U M L A H		764	1986	824	1986	1191	1986	1254	2072	1539	2301

TABEL 12
Rekapitulasi Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau
(Tahun 2017 – 2021)

No	Skala Usaha	Tahun (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	MIKRO	2535	2595	2962	3000	3713
2.	KECIL	201	201	201	253	79
3.	MENENGAH	14	14	14	46	48
J U M L A H		2750	2810	3177	3299	3840

Dari data diatas menunjukan bahwa perkembangan jumlah usaha UMKM di Kab. Malinau cukup pesat.

H. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan suatu media informasi yang menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi perangkat daerah pada tahun yang telah lewat. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- 1. BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan secara ringkas tentang dasar pembentukan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, isu-isu strategis yang dihadapi organisasi, perkembangan usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau Tahun 2021 dan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi (LKJiP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA : Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, dan Strategi & Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
4. BAB IV PENUTUP : Menjelaskan tinjauan umum dari LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020, permasalahan dan kendala umum yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

1. Visi dan Misi

Dalam menjawab tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sebagai bagian dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara terus menerus berupaya mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah baik SDA maupun SDM untuk diolah sehingga bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan, Pemerintah Daerah berperan sebagai pemberi/penyedia fasilitas atau sarana kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menumbuhkembangkan berbagai usaha yang mereka lakukan selama ini agar bisa produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Apa yang diinginkan tersebut harus diawali dengan tahapan-tahapan yang tersusun, terencana dan sistematis, ada indikator/target yang terukur dan diaplikasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Bersifat sementara, berkelanjutan atau permanen (terus-menerus) sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau melalui Visi dan Misi Kabupaten yang sudah ada berupaya merealisasikannya sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode tahun 2016-2021 adalah : **“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) ”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan bagi OPD Dinas Perindag dua misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Misi ke 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
2. Misi ke 6 : Menjadikan ibukota kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil dan lebih maju

yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD berdasarkan :

- 1. Misi ke 4 yakni : Meningkatnya Perekonomian Daerah.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Perindag mengimplementasikannya dalam bentuk tujuan OPD yakni meningkatnya potensi dan prospek usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau.
- 2. Misi ke 6 yakni : Berkembangnya aktivitas ekonomi, perdagangan dan industri.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Perindag mengimplementasikannya dalam bentuk tujuan OPD yakni Meningkatnya potensi dan prospek usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Sama dengan tujuan OPD pada misi ke 4.

TABEL 13
Misi dan Tujuan RPJMD dan Tujuan OPD tahun 2021

No	MISI RPJMD	No	TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD
4.	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;	1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya potensi dan prospek usaha sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau
6.	Menjadikan ibukota kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa.	2.	Berkembangnya aktivitas ekonomi, perdagangan dan industri	

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan suatu kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan. Adapun Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD berdasarkan :

- 1. Misi ke 4 yakni : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu

pada ekonomi desa melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Dinas Perindag mengimplementasikannya dalam bentuk sasaran OPD yakni :

- 1. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.
- 2. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

2. Misi ke 6 yakni dengan sasaran :

a. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Dinas Perindag mengimplementasikannya dalam bentuk sasaran OPD yakni :

- 1. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar.

b. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Dinas Perindag mengimplementasikannya dalam bentuk sasaran OPD yakni :

- 2. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Korelasi antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Sasaran OPD tahun 2021

No	TUJUAN RPJMD	No	SASARAN RPJMD	No	SASARAN OPD
1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan
				2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2.	Berkembangnya aktivitas ekonomi, perdagangan dan industri	2.	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar
		3.	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

4. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah merupakan implementasi dari sasaran yang hendak dicapai.

Korelasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2021

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	- Persentase Koperasi yang dibina - Persentase UMKM yang dibina
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar.	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

6. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi :

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau menetapkan strategi OPD yakni :

1. Meningkatkan Pasar yang dibina dan ditertibkan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

b. Arah Kebijakan :

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau juga menetapkan arah kebijakan dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan daya dukung usaha bagi para pelaku usaha.
2. Memperbanyak jumlah sarana dan prasarana usaha perdagangan.
3. Meningkatkan sosialisasi UU perlindungan konsumen bagi para pedagang.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku usaha industri kecil dan menengah.
5. Memberikan pelatihan-pelatihan teknis terhadap para pelaku usaha.
6. Menata sistem pengelolaan pasar yang baik dan profesional.

7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2021 mengacu pada aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri yakni SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Ada perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : *Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi*
- 2. Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan : *Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*
- 3. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD*
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
Sub Kegiatan : *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
Sub Kegiatan : *Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan*
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*
Kegiatan : Penataan Organisasi
Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*
- 4. Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan : *Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*
Sub Kegiatan : *Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*
Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan : *Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*
Sub Kegiatan : *Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*
- 5. Program : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Kegiatan : Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

6. Program : Pengembangan Ekspor

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional

7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

8. Program : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

9. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian kinerja tersebut terjadi kesepakatan antara penerima amanah (Kepala Instansi/OPD) dan pemberi amanah (Kepala Daerah). Kesepakatan keduanya dalam perjanjian kinerja tersebut didasarkan atas kinerja tertentu yang terukur sesuai dengan indikatornya dan target yang ditetapkan. Penetapan ini sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada OPD yang bersangkutan.

Adapun tujuan penyusunan dan penetapan pada perjanjian kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah serta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai Permen PAN RB No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas pelaporan kinerja instansi pemerintah, maka perjanjian kinerja Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	- Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	5 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	- Persentase Koperasi yang dibina - Persentase UMKM yang dibina	60 % 50 %

3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar	- Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	40 %
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	- Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	5 %

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tahun 2021 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa- si	Capai- an
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	5 %	0 %	0 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	- Persentase Koperasi yang dibina - Persentase UMKM yang dibina	60 % 50 %	47 % 8,42 %	78,33 % 16,84 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar	- Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	40 %	2,17 %	5,4 %

4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	- Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	5 %	2,56 %	51,2 %
----	---	---	-----	--------	--------

Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis sebagaimana yang tertera pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun

Sarana distribusi perdagangan yang dibangun/Pasar adalah pasar yang telah dibangun pada tahun yang bersangkutan diperuntukkan bagi kegiatan transaksi jual beli di dalamnya. Pada tahun 2021 ditetapkan target indikator kinerja dari sarana distribusi perdagangan yang dibangun sebesar 5%. Diketahui bahwa Jumlah pasar yang ada 18 pasar, maka 5 % dari 18 adalah :

$5 \% \times 18 \text{ pasar} = 0,9 \text{ pasar}$ atau dibulatkan menjad 1 pasar.

Artinya, ditargetkan pada tahun 2021 akan dibangun 1 pasar baru. Namun target tersebut tidak terealisasi sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 18
Target indikator pasar yang dibangun dan capain kinerjanya pada tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa-si	Capai-an
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	5 %	0 %	0 %

a. Hambatan dalam pencapaian realisasi

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target atau 0% disebabkan karena adanya kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kab/kota se Indonesia dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini, maka Pemerintah Kab. Malinau menetapkan bahwa anggaran kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan direfocusing atau ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya kegiatan tersebut otomatis ditiadakan. Dilihat dari sisi efektif dan efisien, maka tidak bisa dinilai karena kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.

b. Solusi penyelesaiannya

Untuk tahap selanjutnya pihak Dinas Perindag akan mengusulkan kegiatan serupa di tahun yang akan datang (2022) dengan harapan agar bisa diakomodir dengan baik dan kebijakan refocusing anggaran tidak berlanjut di tahun depan.

2. Persentase Koperasi yang dibina/diberdayakan

Target indikator kinerjanya adalah sebesar 60 % dari 84 koperasi aktif yang

dibina. Yakni sebesar : $60 \% \times 84 \text{ koperasi} = 50,4$, dibulatkan menjadi **50 koperasi**. Namun yang terealisasi 24 koperasi atau sebesar :

$$\frac{24}{50} \times 100 \% = 48 \%$$

Dari realisasi tersebut, maka capaiannya sebesar : $\frac{48}{60} \times 100 \% = 78,33 \%$

Tabel 19
Target indikator koperasi yang dibina dan capain kinerjanya pada tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa- si	Capai- an
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Prosentase koperasi yang dibina/diberdayakan	60 %	48 %	78,33%

a. Hambatan dalam pencapaian realisasi

Faktor penghambat rendahnya capaian kinerja ini karena berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena kebijakan pengetatan anggaran, refocusing anggaran, dll yang semuanya ditujukan untuk program penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2021. Akibat dari kebijakan tersebut, maka semua program dan kegiatan OPD se Kab. Malinau baru bisa dimulai pada bulan Agustus. Dengan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan dan bertumpuknya kegiatan dari program-program yang lain yang juga harus segera dilaksanakan, maka target kinerja tidak bisa tercapai dengan optimal.

b. Efektifitas dan Efisiensi

Ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan, maka tentu saja sangat tidak efektifitas. Hal ini disebabkan karena waktu pelaksanaan yang sangat terbatas (dimulai bulan agustus). Namun karena kegiatan pada pemberdayaan koperasi ini bersifat peningkatan kualitas SDM koperasi maka difokuskan pada bimtek dan pelatihan-pelatihan. Dengan demikian maka waktu yang terbatas itu bisa digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

c. Solusi penyelesaiannya

Untuk tahap selanjutnya pihak Dinas Perindag akan mengusulkan kegiatan serupa di tahun yang akan datang (2022) dengan harapan agar bisa diakomodir dengan baik dan kebijakan refocusing anggaran tidak berlanjut di tahun depan.

3. Persentase UMKM yang dibina

Target indikator kinerjanya adalah sebesar **50 %** dari 3.840 unit usaha yang dibina. Yakni sebesar : $50 \% \times 3.840 = 1.920$ unit usaha. Namun yang terealisasi **8,42 %** atau sebesar : $8,42 \% \times 1920 = 161$ unit usaha. Dari realisasi tersebut, maka capaiannya sebesar :

$$\frac{8,42}{50} \times 100 \% = 16,84 \%$$

Tabel 20
Target indikator UMKM yang dibina dan capain kinerjanya pada tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa-si	Capai-an
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase UMKM yang dibina	50 %	8,42 %	16,84%

a. Hambatan dalam pencapaian realisasi

Faktor penghambat rendahnya capaian kinerja ini berkaitan erat dengan penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2021. Akibat dari kebijakan tersebut, maka semua program dan kegiatan OPD se Kab. Malinau baru bisa dimulai pada bulan Agustus. Dengan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan dan bertumpuknya kegiatan dari program-program yang lain yang juga harus segera dilaksanakan, maka target kinerja tidak bisa tercapai dengan optimal.

b. Efektifitas dan Efisiensi

Ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan, maka keterbatasan waktu tentu saja diupayakan itu seefektif dan seefisien mungkin. Daya serap anggaran sangat dioptimalkan, maka progressnya baik. Tingginya daya serap anggaran disebabkan karena belanja modal yang cukup besar berupa bantuan peralatan dan sarannya untuk pelaku usaha mikro.

c. Solusi penyelesaiannya

Untuk tahap selanjutnya pihak Dinas Perindag akan mengusulkan kegiatan serupa di tahun yang akan datang (2022) dengan harapan agar bisa diakomodir dengan baik dan kebijakan refocusing anggaran tidak berlanjut di tahun depan.

4. Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi

Target indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 40 % dari 2301 pedagang yang ada di Kab. Malinau yakni :

$$\frac{40}{100} \times 2.301 \text{ pedagang} = \mathbf{920 \text{ pedagang}}$$

Sementara realisasi dari target pedagang yang diawasi hanya sebanyak 50 orang pedagang saja dari 920 pedagang atau sebesar : $\frac{50}{920} \times 100 = \mathbf{5,43 \%}$

Dengan demikian maka capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar :

$$\frac{5,43 \%}{40 \%} \times 100 \% = \mathbf{13,57 \%}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Target indikator pelaku usaha perdagangan yang diawasi dan realisasi
Pencapaiannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa- si	Capai- an
1.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	40 %	5,43 %	13,57 %

b. Hambatan dalam pencapaian realisasi

Faktor penghambat rendahnya capaian kinerja ini berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas dengan target kinerja yang terlalu besar, anggaran kegiatan kecil karena adanya kebijakan pengetatan dan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Semua program dan kegiatan OPD se Kab. Malinau baru bisa dimulai pada bulan Agustus. Akibatnya, maka target kinerja tidak bisa tercapai dengan optimal.

b. Efektifitas dan Efisiensi

Ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan, maka tentu saja tidak mencukupi. Hal ini disebabkan karena waktu pelaksanaan yang sangat terbatas (dimulai bulan agustus). Oleh Karena itu sisa waktu yang terbatas itu dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin melalui penjadwalan yang ketat. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal meskipun hanya mampu untuk mencapai target sebesar 5,43 % dari 920 pedagang yang ada yakni 50 pedagang yang tersebar di beberapa kecamatan.

d. Solusi penyelesaiannya

Untuk tahap selanjutnya pihak Dinas Perindag akan tetap mengusulkan kegiatan serupa di tahun yang akan datang (2022) dengan menambah jumlah alokasi anggaran sehingga target sebesar 40 % dari jumlah pedagang di Malinau bisa tercapai serta kebijakan refocusing anggaran tidak berlanjut di tahun depan.

5. Persentase peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Target indikator kinerja dari persentase peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Malinau pada tahun 2021 sebesar 5 % namun terealisasi sebesar 2,53 %. Hal ini berdasarkan data dari BPS Kab. Malinau dalam Buku “ Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2022” hal. 324 yang menampilkan data tahun 2021 pada Table 12.3 mengenai Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga yang berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaen Malinau, 2017-2021. Berdasarkan data tersebut, maka capaian target kinerja hanya sebesar 51,2 %. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Persentase sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Malinau tahun 2021

No	Uraian	Target RPJMD 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5 %	2,53 %	51,2 %

Sumber : BPS Kab. Malinau

a. Hambatan dalam pencapaian realisasi

Faktor utama penghambat rendahnya capaian kinerja ini adalah wabah Pandemi Covid-19 yang masih melanda Kab. Malinau sehingga aktivitas masyarakat khususnya kalangan pelaku usaha industri menjadi terbatas, produktivitas menurun dan volume usaha mengecil. Sementara itu semua program dan kegiatan OPD se Kab. Malinau baru bisa dimulai pada bulan Agustus akibat dampak kebijakan pengetatan/refocusing anggaran dari pemerintah pusat.

b. Efektifitas dan Efisiensi

Ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan, masih bisa dioptimalkan sekalipun terbatas. Untuk progres keuangan, daya serap anggaran termasuk tinggi sehingga progressnya dinilai baik. Mengapa demikian ? hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia untuk pemberdayaan sektor industri sebagian besar dimanfaatkan untuk pengadaan bantuan alat-alat produksi bagi pelaku usaha industri kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian waktu dan anggaran yang tersedia mampu dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.

e. Solusi penyelesaiannya

Untuk tahap selanjutnya pihak Dinas Perindag masih akan mengusulkan kegiatan untuk pemberdayaan pelaku usaha industri di tahun yang akan datang (2022) dengan harapan Pandemi COVID – 19 bisa mereda dan kebijakan refocusing anggaran tidak berlanjut di tahun depan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam menganalisa capaian kinerja, ada beberapa analisis yang dipergunakan dan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 22
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	5 %	0 %	0 %

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	- Persentase Koperasi yang dibina - Persentase UMKM yang dibina	60 % 50 %	47 % 8,42 %	78,33 % 16,84 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	40 %	2,17 %	5,4 %
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	5 %	2,56 %	51,2 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Pada tabel berikut ini akan memperlihatkan perbandingan capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM dengan tahun sebelumnya. Dari sini akan terlihat peningkatan atau penurunan dari capaian yang diraih sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perhatikan tabel tersebut :

Tabel 23
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian tahun 2020	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	%	0 %	5 %	0 %	0 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	- Persentase Koperasi yang dibina	%	95,20 %	60 %	47 %	78,33 %
		- Persentase UMKM yang dibina	%	0 %	50 %	8,42 %	16,84 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar.	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	%	24,87 %	40 %	2,17 %	5,4 %
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	55,90 %	5 %	2,56 %	51,2 %

3. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun sekarang dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Pada tabel berikut ini akan memperlihatkan perbandingan realisasi kinerja tahun sekarang dengan target Dinas Perindag jangka menengah yang terdapat dalam Renstra. Dari sini akan terlihat prosentase dari capaian yang diraih dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 24
Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah sesuai dengan renstra 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Renstra	Prosentase capaian target renstra
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	%	0 %	5 %	0 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	- Persentase Koperasi yang dibina	%	47 %	60 %	78,33 %
		- Persentase UMKM yang dibina	%	8,42 %	50 %	16,84 %
3	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar.	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	%	2,17 %	40 %	5,4 %
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase peningkatan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,56 %	5 %	51,2 %

C. REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 25
Realisasi Anggaran tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun	%	5 %	0 %	0 %	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	24.092.000	0	0%

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	- Persentase Koperasi yang dibina	%	60 %	47 %	78,33 %	- Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	390.303.950	382.829.950	98 %
		- Persentase UMKM yang dibina	%	50 %	8,42 %	16,84 %	- Pemberdayaan Usaha menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.881.322.375	1.747.782.275	93 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terhadap produk yang beredar.	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	%	40 %	2,17 %	5,4 %	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.990.000	49.730.000	99 %
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase peningkatan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5 %	2,56 %	51,2 %	Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.468.122.700	2.117.579.122	82,28%

Bab IV

Penutup

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun. Hal ini adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja SKPD sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD tahun 2016-2021. Dari uraian diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kabupaten Malinau pada tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada poin Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggarannya.

Dengan adanya Pelaporan Kinerja ini dapat diketahui hasil dari kinerja Dinas Perindag Kabupaten Malinau pada tahun 2021 di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tentu saja ini sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja ini akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis berdasarkan data-data yang tersedia. Semua ini sebagai implementasi pertanggungjawaban yang telah dipercayakan kepada masyarakat Kab. Malinau khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.

Kami akui bahwa Pelaporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami akan terus berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakannya sehingga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.